

LAPORAN TAHUNAN



2023

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I MAKASSAR

KATA PENGANTAR



Kami panjatkan puji syukur atas ridha dan rahmat Allah SWT sehingga Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2023 dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan gambaran dari berbagai hasil kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada periode tahun 2023.

Diharapkan berbagai data dan informasi dalam laporan tahunan ini dapat dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dan dapat dijadikan referensi guna penyusunan rencana kegiatan yang akan datang.

Kritik, saran, tanggapan dan peran serta semua pihak sangat kami harapkan, guna peningkatan kualitas data dan validasi informasi (evidence based) dalam penyusunan Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Terima kasih.

Makassar, Januari 2024
Kepala Balai Besar Kekejarantinaaan
Kesehatan Makassar



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	iv
 BAB I ANALISA SITUASI AWAL TAHUN	
A. HAMBATAN TAHUN LALU	1
B. KELEMBAGAAN	1
C. SUMBER DAYA.....	7
 BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA	
A. DASAR HUKUM	18
B. TUJUAN, SASARAN, DAN INDKATOR	19
 BAB III STRATEGI PELAKSANAAN	
A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	23
B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI	29
C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN	30
 BAB IV HASIL KERJA	
A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	38
B. PENCAPAIAN KINERJA.....	40
C. REALISASI ANGGARAN.....	42
D. UPAYA MERAH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI ...	51
 BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kantor Induk/Wilayah Kerja/Pos Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	8
I.2 Jumlah Pegawai Menurut Substansi di Kantor Induk Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	9
I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	9
I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	10
I.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Mutasi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	10
I.6 Rekapitulasi Kendaraan Roda 4 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.....	11
I.7 Rekapitulasi Kendaraan Roda 2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.....	12
I.8 Rekapitulasi Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023 .	13
I.9 Revisi Anggaran KKP Kelas I Makassar Selama Tahun 2023.....	15
II.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
II.2 Tabel Target Capaian Output pada RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	21
IV.1 Pencapaian Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	38
IV.2 Tabel Pencapaian Target per RO pada RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	40
IV.3 Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	42
IV.4 Distribusi Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA/RKAKL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	42

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
I.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	5
III.1 Sertifikat ISO 9001:2015	30
III.2 Kegiatan Simulasi Penanggulangan KKM di Pelabuhan Parepare	32
III.3 Tampilan Aplikasi Langsung Digital	34
III.4 Pemusnahan Arsip	35
III.5 Penandatanganan MoU dengan Institusi Pendidikan	36
III.6 Calon Jamaah Haji di Aula Penerimaan UPT Asrama Haji	37

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	HALAMAN
I.1 Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	7
I.2 Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Umur Tahun 2023	8

BAB I

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. HAMBATAN TAHUN LALU

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2023 antara lain :

1. Belum semua wilayah kerja dan pos memiliki Gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan
2. Tenaga di wilayah kerja dan pos terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua kelompok substansi yang ada di induk
3. Adanya rencana efisiensi dan refocusing anggaran KKP Kelas I Makassar pada bulan Maret 2023 yang bersumber dana Rupiah Murni, namun tidak disetujui oleh DJA menyebabkan anggaran yang rencananya akan diefisiensi tertahan dan tidak direalisasikan selama masa proses revisi. Pengembalian anggaran yang rencananya akan diefisiensi menyebabkan pencairan anggaran menumpuk di akhir tahun
4. Blokir Automatic Adjustment (AA) pada belanja pegawai menyebabkan dilakukan beberapa kali revisi yakni revisi buka blokir pengembalian anggaran ke BA BUN, revisi penambahan anggaran belanja pegawai dari eselon I serta revisi pemenuhan sisa kebutuhan belanja pegawai yang dialihkan dari anggaran teknis.
5. Sumber penghasil PNPB terbesar dari KKP Kelas I Makassar adalah pelayanan vaksinasi namun karena sudah tidak diwajibkan bagi jamaah umrah sehingga permintaan pelayanan vaksinasi terus berkurang.

B. KELEMBAGAAN

Karantina berasal dari bahasa latin “Quadraginta” yang berarti 40. Angka 40 berasal dari peristiwa isolasi yang dilakukan terhadap penderita penyakit menular selama 40 hari agar tidak menyebar ke orang lain. Tahun 1911 di Indonesia penyakit pest muncul di Surabaya, tahun 1916 muncul pest di Semarang dan tahun 1923 pest muncul dengan masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Pada waktu itu regulasi yang berlaku adalah Quarantine Ordonantie (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911), penanganan kesehatan di Pelabuhan dilaksanakan oleh Haven Arts (Dokter Pelabuhan) dibawah Haven Master (Syahbandar). Pada waktu itu Haven Art hanya ada dua yaitu di Pulau Rubiah (Sabang) dan di Pulau Onrust di Teluk Jakarta. Tahun 1949 pemerintah RI membentuk 5 pelabuhan Karantina yaitu Pelabuhan Karantina Kelas I Tanjung Priok dan Sabang, Pelabuhan Karantina Kelas II Surabaya dan Semarang serta Pelabuhan Karantina Kelas III Cilacap.

Inilah awal keberadaan Kesehatan Pelabuhan di Indonesia. Tahun 1959 Indonesia mengeluarkan PP No. 53 tentang penyakit Karantina dan tahun 1962 dibuat UU Karantina No. 1 tentang Karantina Laut dan No. 2 tentang Karantina Udara. Tahun 1970 terbit SK Menteri Kesehatan No.1025/DD/Menkes/78 tentang pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan Eselon IIIB, yakni 10 KKP Kelas A dan 34 KKP Kelas B. Tahun 1985 terbit SK Menkes No.630/Menkes/XII/85 menggantikan SK No. 147/Menkes/IV/78, Jumlah KKP Kelas B bertambah 2 yaitu Bengkulu dan Dilli sehingga jumlah seluruh KKP menjadi 46. Tahun 2004 terbit SK Menkes No.265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa klasifikasi KKP berubah menjadi KKP Kelas I, II dan III.

Kemudian pada tahun 2007, terbit Permenkes nomor 167 merupakan perbaikan Kepmenkes No. 265 yakni penambahan KKP kelas III menjadi 32 KKP sekaligus wilayah kerjanya dan pada tahun 2008 perubahan Permenkes menjadi No. 356 yang didalamnya terdapat beberapa perubahan. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan Permenkes menjadi nomor 2348 dengan penambahan satu kelas KKP Kelas IV, yaitu Yogyakarta. Aturan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan terus mengalami perubahan.

Tahun 2020 terbit Permenkes nomor 77 dimana struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan mengalami perubahan dengan menyederhanakan jabatan struktural menjadi Kepala Kantor dan Subbagian Administrasi Umum sedangkan Eselon III dan IV lainnya disetarakan menjadi jabatan fungsional.

Tahun 2021 terbit Permenkes nomor 33 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan struktur organisasi masih sama seperti sebelumnya dan penambahan dua KKP baru yakni KKP Kelas IV Entikong di Kalimantan Barat dan KKP Kelas IV Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur sedangkan KKP Kelas IV Yogyakarta berubah menjadi KKP Kelas III Yogyakarta. KKP Kelas I Makassar masih mencapai nilai klasifikasi sebagai KKP Kelas I berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan terus mengalami perubahan organisasi. Tahun 2023 terbit Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. UPT bidang kekarantinaan adalah UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar

udara, dan pos lintas batas darat negara. Klasifikasi UPT Bidang kekarantinaan Kesehatan meliputi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II, dan Loka Kekarantinaan Kesehatan.

Permenkes 10 tahun 2023 tersebut mulai diterapkan per tanggal 1 Januari 2024. Tahun 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berubah nama menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Namun pada tahun 2023 masih menggunakan nama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dan pada tugas fungsi pada dasarnya sama yakni melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Permenkes Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Berdasarkan Permenkes Nomor : 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Berdasarkan kedua Permenkes tersebut di atas, pada dasarnya tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berubah nama menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan masih tetap sama.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KKP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat

- angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
 - f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
 - g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
 - h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
 - k. pelaksanaan urusan administrasi KKP

3. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar menjabarkan visinya yakni Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
- b. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
- b. Perbaikan Gizi Masyarakat;
- c. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Pemberdayaan GERMAS;
- e. Memperkuat sistem kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni :

- a. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
- b. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
- c. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
- d. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni :

- a. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
- c. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

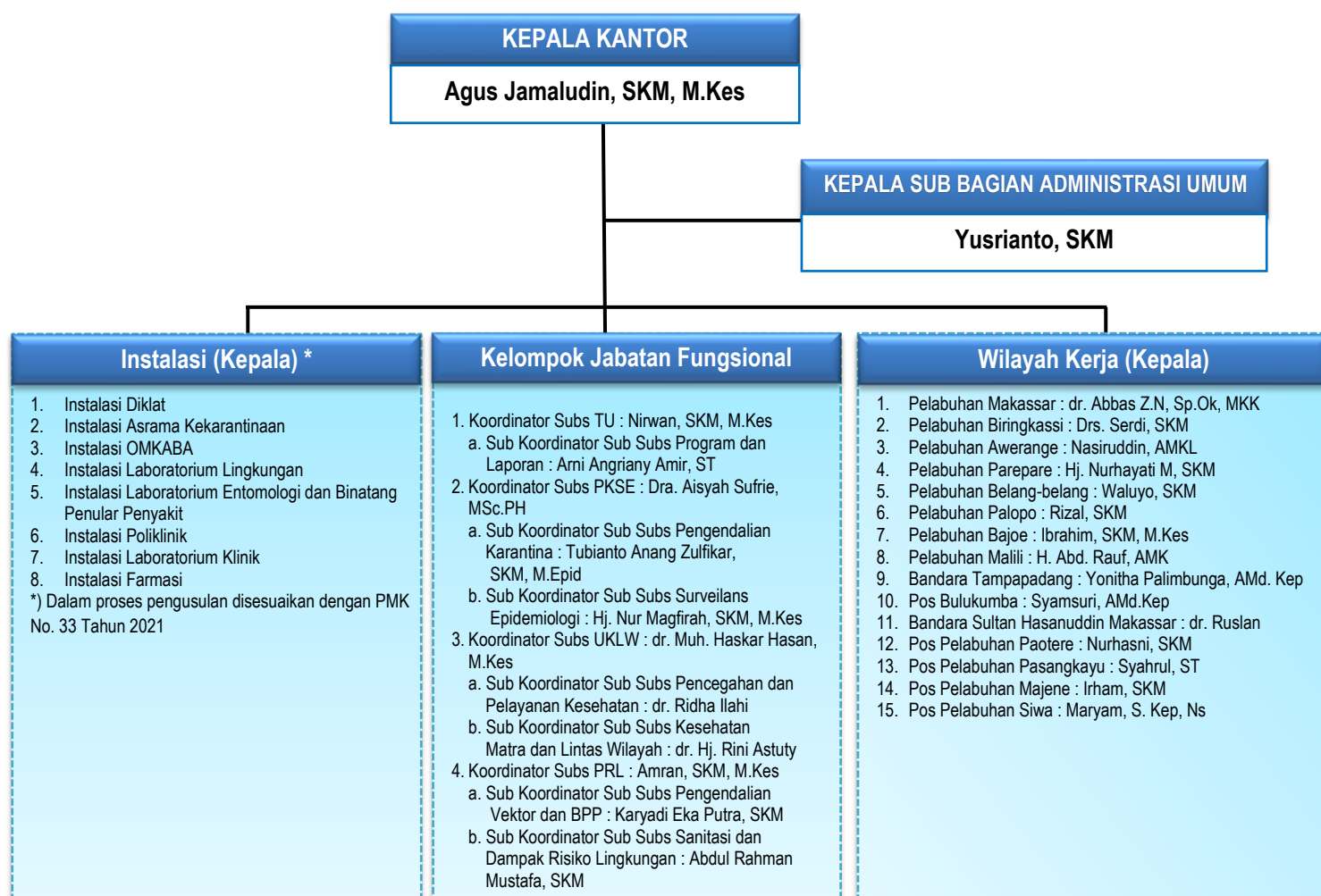
4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Wilayah Kerja
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Instalasi

Kepala KKP Kelas I Makassar Agus Jamaludin, SKM, M.Kes dilantik pada 2 September 2022 dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Yusrianto, SKM dilantik pada 2 Oktober 2023 dan menjabat hingga saat ini.

Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut.



Gambar I.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

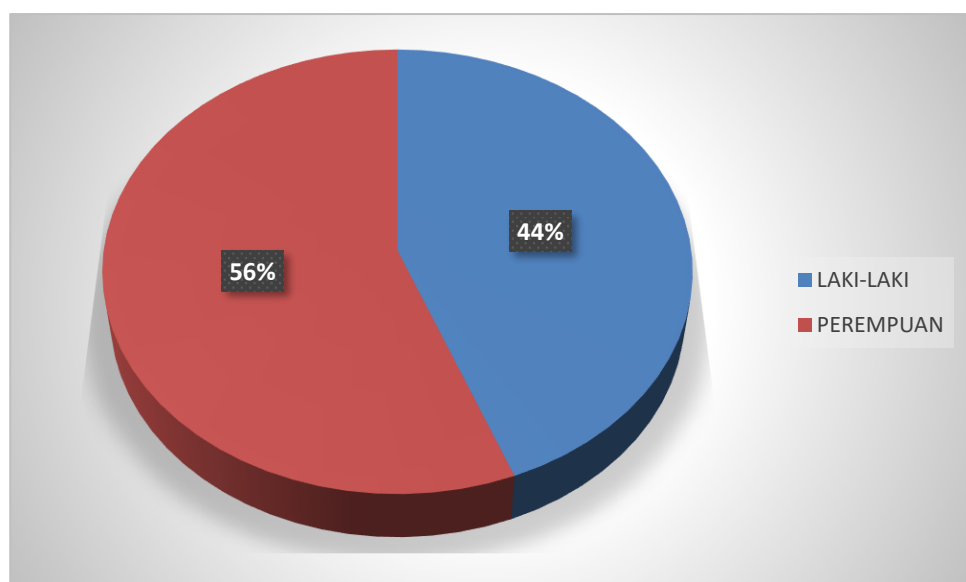
C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan sangat penting karena merupakan pelaksana kegiatan. Berdasarkan data SIMKA Desember 2023 jumlah ASN KKP Kelas I Makassar sebanyak 127 orang terdiri dari 125 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 2 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Distribusi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Substansi/Wilayah Kerja/Pos, golongan dan tingkat pendidikan, dll dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik I.1
Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

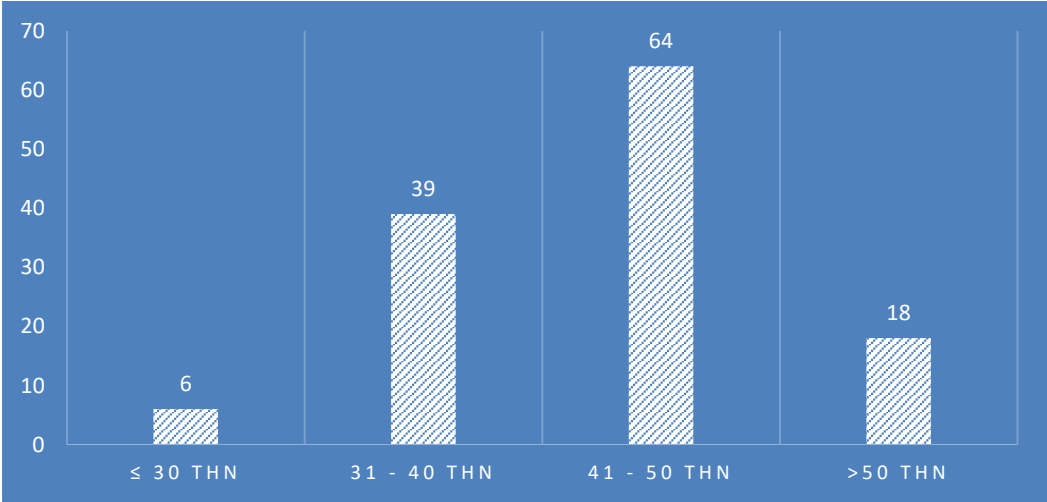


Sumber : Data SIMKA, 2023

Berdasarkan grafik I.1 terlihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 56 orang (44%) dan perempuan sebanyak 71 orang (56%) dengan jumlah total 127 orang.

2. Berdasarkan Umur

Grafik I.2 Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Umur Tahun 2023



Sumber : Data SIMKA, 2023

Berdasarkan grafik I.2 menunjukkan jumlah pegawai dengan kelompok umur 41 – 50 tahun adalah yang terbanyak di KKP Kelas I Makassar yakni sebanyak 64 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok umur di atas ≤ 30 tahun sebanyak 6 orang.

3. Berdasarkan Kantor Induk/Wilayah Kerja/Pos

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Kantor Induk/Wilayah Kerja/Pos Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

No	Kantor Induk/ Wilayah kerja/ Pos	2023
1	Kantor Induk	72
2	Wilayah kerja Pelabuhan Laut Makassar	19
3	Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi	3
4	Wilayah kerja Pelabuhan Parepare	6
5	Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange	2
6	Wilayah Kerja Bandara Tampapadang	5
7	Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-belang	1
8	Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo	3
9	Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe	3
10	Wilayah Kerja Pelabuhan Malili	3
11	Pos Pelabuhan Bulukumba	2

No	Kantor Induk/ Wilayah kerja/ Pos	2023
12	Pos Pelabuhan Rakyat Paotere	4
13	Pos Pelabuhan Siwa	2
14	Pos Pelabuhan Pasangkayu	1
15	Pos Pelabuhan Majene	1
Jumlah		127

Sumber : Data SIMKA, 2023

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan jumlah pegawai paling banyak ditempatkan di Kantor Induk yang berlokasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yakni sebanyak 72 orang yang terdiri dari Substansi Tata Usaha, Substansi UKLW, Substansi PKSE dan Substansi PRL, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2. Sedangkan untuk Wilayah Kerja terbanyak di Pelabuhan Laut Makassar sebanyak 19 orang yang juga terdiri dari berbagai Substansi. Untuk Wilayah Kerja/Pos lain disesuaikan dengan kebutuhan pada Wilayah Kerja tersebut.

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Menurut Substansi di Kantor Induk Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

No	Bagian/Bidang	2023
1	Kepala Kantor	1
2	Substansi Tata Usaha	17
3	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	13
4	Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan	13
5	Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	28
Jumlah		72

Sumber : Data SIMKA, 2023

4. Berdasarkan Golongan

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

Golongan	2023	%
II	12	10%
III	92	74%
IV	21	17%
Jumlah	127	100

Sumber : Data SIMKA, 2023

Dari Tabel I.3 diatas, dapat diinformasikan bahwa jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar tahun 2023 berdasarkan Golongan, terbesar adalah Golongan III sebanyak 92 orang (74%), untuk Golongan II sebanyak 12 orang (10%), dan untuk Golongan IV sebanyak 21 orang (17%)

5. Berdasarkan Pendidikan

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	2023
S2	20
S1	64
DIV	6
DIII	34
SMA	3
Jumlah	127

Sumber : Data SIMKA, 2023

Berdasarkan Tabel I.4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah tertinggi pada pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 65 orang dan terendah pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 3 orang.

6. Mutasi Pegawai

Tabel I.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Mutasi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

Jenis Mutasi	2023
Pensiun	3
Mutasi Masuk	0
Mutasi Keluar	0
Meninggal	0
CPNS	0
Jumlah	4

Sumber : Data SIMKA, 2025

Berdasarkan tabel I.5, Tahun 2023 ada tiga orang pensiun dan dua orang PPPK yang masuk. Salah satu pegawai yang pensiun adalah Kepala Sub Bagian Administrasi Umum. Formasi PPPK sebanyak dua orang yang lulus dan masuk tahun 2023 yakni satu orang tenaga perawat terampil dan satu orang tenaga entomolog kesehatan terampil.

2. Sarana Prasarana

Inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.

1) Barang Bergerak

Data barang bergerak berupa kendaraan roda 4, roda 2 dan kendaraan bermotor lainnya tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel I.6
Rekapitulasi Kendaraan Roda 4 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah	Keterangan	Status
1	Station Wagon	Mitsubishi Pajero	1	Kendaraan Kepala Kantor	Rusak Berat
2	Mini Bus	Toyota Inova	1	Kendaraan Boarding	Baik
3	Kendaraan Penumpang Lainnya	Hino	1	Mobil Jemputan Pegawai	Baik
4	Mobil Ambulance	Mitsubishi L200	1	Ambulance Pos Majene	Rusak Ringan
5	Mobil Ambulance	Mitsubishi L300	1	Ambulance Eks Awerange	Rusak Berat
6	Mobil Ambulance	Izusu NHR55	1	Ambulance Eks Bulukumba	Rusak Berat
7	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Kantor Induk	Baik
8	Mobil Ambulance	Suzuki APV Arena	1	Ambulance Pos Siwa	Baik
9	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Bandara	Baik
10	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Pelabuhan Makassar	Baik
11	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Bajoe	Baik
12	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Awerange	Baik
13	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Mamuju	Baik
14	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Pos Paotere	Baik
15	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Pos Bulukumba	Baik
16	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Palopo	Baik

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah	Keterangan	Status
17	Mobil Ambulance	Mitshubishi Expander	1	Ambulance Parepare	Baik
18	Mobil Ambulance	Mitshubishi Expander	1	Ambulance Biringkassi	Baik
19	Kendaraan Klinik	Izusu 120 PS	1	Kendaraan Rongen	Rusak Berat
20	KendaraanTaktis	Ford Ranger 2.9	1	Kendaraan Operasional	Rusak Ringan
21	KendaraanTaktis	Daihatzu Terios MT	1	Kendaraan Operasional	Baik
22	KendaraanTaktis	DaihatzuTerios MT	1	Kendaraan Operasional	Baik
23	KendaraanTaktis	Toyota Rush GM	1	Kendaraan Operasional	Baik
24	KendaraanTaktis	Nissan Evalia	1	Kendaraan Operasional	Baik
25	KendaraanTaktis	Toyota Rush 7-Seater	1	Kendaraan Operasional	Baik
26	KendaraanTaktis	Toyota Rush 7-Seater	1	Kendaraan Operasional	Baik
27	Mobil Pick Up	Toyota Hilux 4x4	1	Kendaraan Vektor Kantor Induk	Baik
Jumlah			27	Unit	

Sumber : Data Laporan BMN KKP Kelas I Makassar, 2023

Berdasarkan tabel rekapitulasi kendaraan roda 4 terlihat dari 27 kendaraan roda 4 yang dimiliki KKP Kelas I Makassar, terdapat 4 kendaraan dalam kondisi rusak berat yakni 1 unit station wagon, 2 unit ambulance dan 1 unit kendaraan klinik. 2 unit kendaraan dalam kondisi rusak ringan yakni 1 ambulance dan kendaraan taktis. Semua kendaraan yang dalam kondisi rusak berat tersebut telah dilakukan lelang untuk penghapusan barang. Tahun 2023 terdapat penambahan 1 unit kendaraan mini bus untuk peruntukan kendaraan boarding.

Tabel I.7 Rekapitulasi Kendaraan Roda 2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

No	NamaBarang	Merek/Type	Jumlah	Status
1	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2	Baik
2	Sepeda Motor	Honda Supra D125	1	Rusak Berat
3	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2	Baik
4	Sepeda Motor	Honda Revo	2	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	2	Baik
6	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	1	Rusak Berat
7	Sepeda Motor	Honda Beat	3	Baik
Jumlah			13	Unit

Sumber : Data Laporan BMN KKP Kelas I Makassar, 2023

Tabel rekapitan kendaraan roda 2 menunjukkan dari 13 unit sepeda motor yang dimiliki KKP Kelas I Makassar tahun 2023, 11 Kendaraan yang status Baik dan 2 dalam kondisi rusak berat. Tidak ada penambahan kendaraan roda dua di tahun 2023. Tahun 2023 juga diikuti lelang kendaraan motor sepaket dengan kendaraan roda empat yang dalam kondisi rusak berat. Kendaraan roda dua yang dilelang adalah Suzuki Axelo 125.

2) Barang tidak bergerak

Berikut data rekapitulasi tanah dan bangunan KKP Kelas I Makassar tahun 2023 :

Tabel I.8 Rekapitulasi Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

No	Nama Barang	Kondisi	Kuantitas	Alamat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	Baik	120 M ²	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare
2	Tanah Pemerintah	Baik	204 M ²	Jl. Perumnas Toddopuli V No.9 Makassar
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	4000 M ²	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1230 M ²	Desa/Kec. Cappa Galung Kec. Bacukiki Parepare
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1360 M ²	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	2531 M ²	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	800 M ²	Kel. Mangempang Kec.Barru Kab.Barru
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	1000 M ²	Jl. Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	12,160 M ²	Jl. Poros Mamuju - Pasangkayu Sulawesi Barat
10	Bangunan Gudang Lainnya	Baik	197 M ²	Jl. Bandara Lama Kab. Maros
11	Bangunan Gudang Lainnya	Baik	123 M ²	Jl. Puang Midding Kota Parepare
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1000 M ²	Jl. Hatta No.3 Makassar (Pelabuhan Makassar)
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1718 M ²	Dusun Baddo- Baddo Kec. Baji Mangngai Maros
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	500 M ²	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	850 M ²	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200.16 M ²	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	750 M ²	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Sulawesi Barat
18	Rumah Negara Golongan II Type D	Baik	36 M ²	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare

19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	999 M ²	Jl. Bowong Cindea Kec. Bungoro Kab Pangkep
----	----------------------------------	------	--------------------	--

Sumber : Data Laporan BMN KKP Kelas I Makassar, 2023

3. Dana

PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berasal dari kegiatan pelayanan jasa alat angkut, pelayanan kesehatan/medik, pelayanan kesehatan lingkungan dan pelayanan jasa penggunaan alat/fasilitas kegiatan Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan yang dapat dilaksanakan oleh KKP Kelas I Makassar (air, makanan dan substansi lingkungan lainnya), pemeriksaan laboratorium medik dalam pelayanan upaya kesehatan pelabuhan, ketersediaan vaksin meningitis bantuan dari Kementerian Kesehatan RI terus meningkat dari tahun ketahun. Ada pun Jenis kegiatan sumber PNBP sesuai PP No. 64 Tahun 2019 yang sering digunakan dalam pelayanan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Jasa Pemeriksaan Kapal dalam karantina (Certificate of Pratique)
- b. Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC / SSCC)
- c. Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (Health Book)
- d. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal (PHQC)
- e. Jasa Pemeriksaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan dalam rangka Penerbitan Sertifikat (P3K)
- f. Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)
- g. Jasa Pemberian Surat Keterangan Medical Contraindication of Vaccination
- h. Vaksinasi
- i. Pemakaian Ambulance
- j. Jasa Pelayanan Pemeriksaan OMKABA di kapal dan Pesawat.
- k. Jasa Pelayanan Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Kapal dan Pesawat).
- l. Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan Surat Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga di lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD).
- m. Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Kualitas Air di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD) untuk Keperluan Alat Angkut.

Penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang tertuang dalam realisasi anggaran belanja DIPA/RKAKL (daftar isian

pelaksanaan anggaran), bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP. Realisasi anggaran KKP Kelas I Makassar tahun 2023 sebesar Rp. 33.141.972.269,- (97,80%) dari total anggaran Rp. 33.888.156.000,-

Tata cara revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Aturan revisi anggaran ini tidak lagi menetapkan tahun dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga ada peraturan baru yang menggantikan. Pada tahun 2023 dilakukan 12 kali revisi DIPA sebagai berikut :

Tabel I.9 Revisi Anggaran KKP Kelas I Makassar Selama Tahun 2023

No	Revisi Anggaran	Tanggal Pengesahan DIPA	Anggaran		Total	Keterangan
			RM	PNBP		
1	DIPA Awal	30 November 2022	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	
2	Revisi DIPA 1	26 Desember 2022	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp4.313.797.000 pada belanja pegawai (51)
3	Revisi DIPA 2	16 Februari 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan I
4	Revisi DIPA 3	17 April 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan II
5	Revisi DIPA 4	23 Juni 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi DJA Perbaikan Halaman IV.b
6	Revisi DIPA 5	13 Juli 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan III
7	Revisi DIPA 6	18 Juli 2023	29.914.444.000	2.073.884.000	31.988.328.000	Buka Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp4.313.797.000 pada belanja pegawai (51) (dikembalikan ke BA BUN)
8	Revisi DIPA 7	20 Agustus 2023	30.394.172.000	2.073.884.000	32.468.056.000	Penambahan anggaran belanja mengikat sebesar Rp479.728.000 (001 sebesar Rp284.397.000 dan 002 sebesar Rp195.331.000)

9	Revisi DIPA 8	12 Oktober 2023	30.394.172.000	2.073.884.000	32.468.056.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan IV
10	Revisi DIPA 9	30 Oktober 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Penambahan Pagu belanja pegawai sebesar Rp1.420.100.000
11	Revisi DIPA 10	13 November 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Pemutakhiran POK - KPA
12	Revisi DIPA 11	21 November 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Kanwil Pemenuhan Belanja Pegawai melalui pergeseran internal
13	Revisi DIPA 12	27 Desember 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Pemutakhiran POK - KPA

Sumber : Data Primer, 2023

Tahun 2023 dilakukan dua belas kali revisi DIPA, revisi yang dilakukan baik ditingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil DJPb, dan DJA. Revisi yang dilakukan pada tingkat DJA yakni revisi blokir Automatic Adjustment (AA), revisi perbaikan Halaman IV.b, buka blokir dengan mengembalikan anggaran ke BA BUN, dan revisi penambahan anggaran dari Eselon I. Revisi pada tingkat Kanwil DJPb, selain revisi halaman III DIPA yang dilakukan tiap triwulan juga dilakukan revisi pergeseran anggaran internal antar jenis belanja untuk pemenuhan belanja pegawai.

Revisi dengan terbitnya DIPA baru sebanyak 12 kali, namun dalam proses revisi sepanjang tahun, terjadi rencana revisi yang pada akhirnya tidak mendapat persetujuan oleh DJA. Bulan Maret 2023 terbit Surat Dirjen P2P Nomor : PR.04.02/C/1055/2023 tanggal 17 Maret 2023 Hal : Penetapan Distribusi Pagu Revisi Efisiensi dan Refocusing Anggaran Ditjen P2P TA. 2023, dalam surat tersebut KKP Kelas I Makassar mendapat nilai efisiensi sebesar Rp.4.501.242.000,- bersumberdana Rupiah Murni. Proses penginputan revisi pada aplikasi SAKTI dan desk revisi dilakukan secara bertahap dengan eselon I, Roren, Itjen dan beberapa kali dikembalikan ke satker sebelum diajukan ke tingkat DJA. Namun setelah proses revisi ke DJA melalui eselon I telah dilakukan oleh semua satker yang termasuk dalam pembagian revisi efisiensi dan refocusing, terbit Surat Sesditjen P2P Nomor : PR.04.02/C.I/6665/2023 tanggal 27 Juni 2023

Hal : Penyampaian Informasi Usulan Revisi Tahap-3 Satker di Lingkungan Ditjen P2P TA 2023 yang menyatakan salah satunya bahwa revisi belum disetujui. Sehingga anggaran yang rencananya akan diefisiensi tertahan dan tidak direalisasikan harus segera disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta direalisasikan anggarannya mengingat perjanjian kinerja Satker yang mengharuskan realisasi anggaran minimal 95%.

Proses revisi anggaran tahun 2023 menggunakan aplikasi SAKTI dan upload data melalui Satudja sedangkan arsip hardcopy disimpan oleh satker. Semua pelaksanaan revisi dilaksanakan secara online tanpa tatap muka langsung.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
4. UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
5. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangnya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi internasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
22. Kepmenkes Nomor 424 Tahun 2007 Tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
23. Keputusan Menkes Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
24. Keputusan Menkes Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;
25. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara.
26. International Health Regulation Tahun 2005;

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

1. Tujuan

1) Tujuan Umum

Terlaksananya upaya cegah tangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan dan Bandar udara

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk Negara dan wilayah;
- b) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. Sasaran dan Indikator

Sasaran serta indikator tahun 2023 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	No	Indikator	Target
Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1.	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
	2.	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
	3.	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran	85
	5.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93
	6.	Kinerja implementasi WBK Satker	81
	7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
	8.	Persentase Realisasi Anggaran	95%

Sumber : Perjanjian Kinerja, 2023

Perjanjian Kinerja awal hanya ada tujuh indikator kinerja, kemudian direvisi menjadi Sembilan indikator dengan penambahan indikator persentase realisasi anggaran sebesar 95% dan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti sebesar 92,5%. Terakhir direvisi menjadi delapan indikator sesuai tabel di atas dimana indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dihilangkan karena tidak ada temuan hasil pemeriksaan BPK.

Secara nyata, target tahun 2023 yang ada dalam RKAKL telah ditentukan dalam penyusunan perencanaan dan tertuang dalam DIPA KKP Kelas I Makassar berupa target capaian ouput adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2 Tabel Target Capaian Output pada RKAKL KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023**

Kode			Kegiatan	Target	
Kegiatan	KRO	RO			
4249	PEA	'001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	6	Kegiatan
4249	QAA	'011	Pelayanan kesehatan haji (HS)	7,224	Orang
4249	QAA	'012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	5,425	Orang
4249	QAH	'016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	12	layanan
4249	QAH	'017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	47	layanan
4249	QAH	U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	250	layanan
4249	QAH	U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	240	layanan
4249	QAH	U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	62	layanan
4249	QAH	U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	69	layanan
4249	QAH	U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	28	layanan
4249	QAH	U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	310	layanan
4249	QAH	U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	20	layanan
4249	QAH	U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	114	layanan
4249	QAH	U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	35	layanan
4249	QAH	U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	14	layanan
4249	QAH	U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	60	layanan
4249	RAB	'001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	8	Paket
4249	TBC	'001	Pelatihan kesehatan (HS)	73	Orang
4815	AEA	501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1	kegiatan
4815	AEA	502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	1	kegiatan

Kode			Kegiatan	Target	
Kegiatan	KRO	RO			
4815	AEA	503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	1	kegiatan
4815	AEA	504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	1	kegiatan
4815	AEA	505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	1	kegiatan
4815	CAN	'001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Unit
4815	EBA	956	Layanan BMN	1	Layanan
4815	EBA	957	Layanan Hukum	1	Layanan
4815	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan
4815	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan
4815	EBA	962	Layanan Umum	1	Layanan
4815	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
4815	EBA	994	Layanan Perkantoran	12	Layanan
4815	EBB	951	Layanan Sarana Internal	14	Unit
4815	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit
4815	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	130	Orang
4815	EBC	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	14	Orang
4815	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen
4815	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen
4815	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	12	Dokumen
4815	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	12	Dokumen

Sumber : RKAKL, 2023

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran adalah melakukan evaluasi bulanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran melalui monev e-performance, e-monev Bappenas dan SMART DJA.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja serta evaluasi terhadap realisasi kegiatan yang ada dalam RKAKL 2023 yang mendukung pencapaian indikator.

Adapun kegiatan yang tertuang dalam RKAKL 2023 yakni :

4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

1. Koordinasi pelayanan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Petugas Wilker
 - b. Pertemuan koordinasi evaluasi pelaksanaan embarkasi/Debarkasi haji
 - c. Monitoring/ Bimbingan Teknis /Asistensi Ke Wilayah Kerja
 - d. Konsultasi Pelaksanaan Program P2P
 - e. Pertemuan/koordinasi LP/LS program karkes dan kespel
 - f. Rapat Koordinasi bagi klinik dan Rumah Sakit pelaksanan pelayanan Vaksinasi internasional dan penerbitan ICV
2. Pelayanan kesehatan haji di bandara
 - a. Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional praembarkasi haji
 - b. Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji
 - c. Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji
 - d. Surveilans Kesehatan Haji Pasca Debarkasi
 - e. Penyusunan Laporan Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi/Debarkasi Haji
 - f. Evaluasi dan pembinaan syarat laik terbang bagi jemaah haji
3. Pemeriksaan kesehatan masyarakat

- a. Verifikasi dan pengawasan terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional
 - b. Kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan kesehatan
 - c. Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja
 - d. Pelayanan Skrining HIV-AIDS Dalam rangka Hari AIDS Sedunia
 - e. Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan / Bandara
 - f. Pelaksanaan Walk Through Survey (WTS) Faktor Risiko Potensi Bahaya Pada Pelayanan Kesehatan
 - g. Mobile Vaksinasi
 - h. Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar
 - i. Skrining kesehatan bagi pekerja dan pengguna jasa bandara/pelabuhan
4. pengendalian faktor risiko lingkungan
 - a. Pelaksanaan Pra Embarkasi
 - b. Uji Resistensi / Efikasi Insektisida
 - c. Tindakan penyehatan (desinfeksi TTU, dan lingkungan)
 - d. Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkantoran/industri/TTU/TPM
 - e. Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan
 - f. Diseminasi Informasi Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan
 - g. Penyuluhan Keamanan Pangan
 - h. Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan
 - i. Pengembangan program pelabuhan /bandara sehat
 - j. Self Assesment Pelabuhan/Bandara Sehat
 - k. Pemusnahan Limbah Medis
 - l. Survey dan konfirmasi vektor
 - m. Pengamatan faktor risiko malaria (survey Anopheles sp)
 5. pemeriksaan orang, barang, alat angkut
 - a. Layanan Pengendalian Faktor risiko pada alat angkut, orang dan barang
 - b. Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut
 - c. Pemeriksaan Kekarantinaan Alat Angkut
 - d. Table Top Exercise di Pelabuhan Makassar
 - e. Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB / Penyelidikan Epidemiologi
 - f. Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis
 - g. Pengawasan Pelaku Perjalanan (Relawan)
 - h. Tracing bagi pelaku perjalanan

- i. Tindakan penyehatan alat angkut/Lingkungan
 - j. Dukungan pelaksanaan skrining kesehatan bagi pelaku perjalanan di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Bandara dan pelabuhan
 - k. Pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional
 - l. Pendampingan Surveilans Migrasi Malaria
 - m. Supporting dropping kebutuhan Alkes/Perbekkes/Peralatan/blangko
 - n. Pertemuan koordinasi Pelayanan Kekarantinaan kesehatan
 - o. Desiminasi Informasi
 - p. Simulasi Penanggulangan KKM di Pelabuhan Parepare
 - q. Peningkatan pelayanan kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara
 - r. Assesment Core Capacity di Pintu Masuk
 - s. Pemeriksaan faktor Risiko dan promosi kesehatan pada alat angkut dan awak
 - t. Evaluasi layanan penerbitan dokumen kesehatan alat angkut
 - u. Healthy Awarenesss Bagi Pelaku Perjalanan
 - v. Refreshing TGC KKP Makassar merespon KKM
 - w. Simulasi/rencana renkon penanggulangan KKM/pengendalian faktor risiko
6. Pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan penyeberangan
 7. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara
 8. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD
 9. Layanan survei faktor risiko penyakit pes
 10. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare
 11. Layanan survei faktor risiko penyakit DBD
 12. Layanan survei faktor risiko penyakit malaria
 13. Layanan survei faktor risiko penyakit diare
 14. Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS
 15. Layanan survei faktor risiko penyakit TB
 16. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria
 - a. Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan
 - b. Perlengkapan Pengendalian Faktor Risiko
 - c. Bahan dan kelengkapan pengendalian vektor

- d. Bahan dan kelengkapan lab sanitasi
- e. APD dan Bahan Pelayanan Laboratorium
- f. Fasilitas penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan
- g. Penyediaan Bahan Kesehatan
- h. Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai
- i. Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

17. Pelatihan Bidang Kesehatan

- a. Mengikuti Workshop / Simposium Surveilans Epidemiologi dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Petugas
- b. Mengikuti Seminar/Kursus/Workshop terkait kekarantinaan kesehatan
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Entomolog Kesehatan (Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus, on the job training yang berhubungan dengan pengendalian vektor dan BPP)
- d. On The Job Training Pengendalian Vektor dan BPP di BTKLPP Surabaya
- e. On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan
- f. Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan
- g. Peningkatan kualitas SDM Laboratorium
- h. Pelatihan Phlebotomi
- i. Pelatihan Kedaruratan Kesehatan
- j. On The Job Training ke BTKLPP Makassar dalam rangka kegiatan konfirmasi vektor
- k. Peningkatan kapasitas/Seminar/Workshop/Ujian Kompetensi ASN
- l. Pelatihan diseminasi informasi melalui pelatihan video editing

4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 1. Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program
- 2. Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program
- 3. Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran
- 4. Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi
- 5. Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum
 - a. Pertemuan/Konsultasi Terkait Kepegawaian dan Umum
 - b. Pertemuan/Rapat/Koordinasi dukungan manajemen

6. Pengadaan alat pengolah data dan informasi
7. Pengelolaan BMN
 - a. Pengelolaan BMN
 - b. Penyusunan RKBMN
 - c. Penghapusan dan Pemusnahan BMN/Arsip
8. Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P (Penguatan Tusi PPNS)
9. Pelayanan humas dan protokoler
 - a. Desiminasi Informasi melalui media KIE
 - b. Koordinasi Penanganan Aduan Masyarakat
10. Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Pengembangan WBK
 - b. Penyusunan/Monev SOP
 - c. Konsolidasi dan Penguatan SPIPT dan WBK
11. Layanan umum dan perlengkapan (Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa)
12. Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit (Penyusunan profil)
13. Pembayaran gaji dan tunjangan
14. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - a. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran
 - b. Pengurusan sertifikat Tanah
 - c. Perpanjangan domain dan maintenance website
 - d. Pengadaan pakaian dinas
 - e. Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya
 - f. Pemeliharaan gedung dan bangunan
 - g. Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor
 - h. Pemeliharaan dan Operasional kendaraan R4
 - i. Pemeliharaan dan operasional kendaraan R2
 - j. Perbaikan peralatan fungsional
 - k. Langganan daya dan jasa
 - l. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
 - m. Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja

- n. Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service
 - o. Sewa gedung/kantor/wilker
 - p. Sewa rumah jabatan
 - q. Kalibrasi alat-alat kesehatan
 - r. Pas pelabuhan/bandara
 - s. Kebersihan kantor
 - t. Sewa Mesin Fotocopy
 - u. Pemeriksaan Kesehatan ASN
 - v. Langganan Internet Service Provider
 - w. Sewa kendaraan Jabatan dan kendaraan operasional
 - x. Operasional Kendaraan Sewa
 - y. Langganan Aplikasi Meeting Virtual Berbayar
 - z. Penataan Halaman
 - aa. Pembiayaan tenaga outsourcing
15. Pengadaan fasilitas perkantoran
 16. Pengadaan kendaraan bermotor
 17. Pembangunan fasilitas penunjang (Pekerjaan Aspal Keliling Jalan Kompleks Kantor)
 18. Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P
 - a. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai / Pertemuan Kepegawaian
 - b. Layanan Mutasi Kepegawaian/Pelatihan Kepemimpinan
 - c. Pertemuan Kepegawaian
 19. Layanan Pendidikan dan pelatihan SDM Ditjen P2P
 20. Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen
 - a. Penyusunan RKA-K/L
 - b. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran
 - c. Penyusunan erenggar
 - d. Pertemuan/ Konsultasi pengelolaan/Pelaporan PNB
 21. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
 - a. Penyusunan laporan pelaksanaan program
 - b. Penyusunan Laporan E Monev / pertemuan evaluasi

- c. Penyusunan Laporan Tahunan satker
 - d. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 - e. Evaluasi SAKIP/Reviu Lakip
22. Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P
- a. Penyusunan Laporan Keuangan
 - b. Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2020 dan Semester I TA 2021
 - c. Rekonsiliasi Pengelolaan PNB
 - d. Koordinasi Pengelolaan PNB
23. Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P
- a. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U)
 - b. Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
24. Penyelenggaraan Kearsipan
- a. Konsultasi Kearsipan
 - b. Pertemuan Kearsipan
 - c. Monitoring kearsipan

B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada dalam RKAKL 2023 yakni :

1. Rencana efisiensi dan refocusing anggaran KKP Kelas I Makassar sebesar Rp4.501.242.000,- yang bersumberdana Rupiah Murni pada kegiatan teknis 4249 sehingga anggaran yang telah direncanakan akan diefisiensi tersebut tertahan dan tidak digunakan namun pada akhirnya dikembalikan ke satker sehingga anggaran tersebut harus tetap direalisasikan dan menumpuk kegiatan di akhir tahun.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana termasuk jumlah tenaga khususnya di wilayah kerja.

C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

1. Resertifikasi ISO 9001:2015

Sertifikat ISO sebelumnya berlaku sampai 22 Februari 2023, sehingga dilakukan resertifikasi ISO kembali. Ruang lingkup yang dilakukan audit resertifikasi ISO 9001:2015 adalah pelayanan vaksinasi internasional, pelayanan terpadu penerbitan dokumen Kesehatan kapal, pelayanan sertifikat laik terbang dan pelayanan pemeriksaan pelaut di Kantor Induk Bandara Sultan Hasanuddin dan Wilker Pelabuhan Makassar. Prinsip manajemen mutu adalah fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pelibatan orang, pendekatan proses, peningkatan, bukti berdasarkan keputusan yang dibuat dan manajemen relasi. Standar ISO 9001 : 2015 ini menerapkan pendekatan proses yang menggabungkan siklus Plan – Do – Check – Act (PDCA) dan pemikiran berbasis risiko (risk-based thinking).

Audit resertifikasi ISO dilaksanakan oleh auditor eksternal dari PT Mutuagung Lestari pada tanggal 20 – 23 Maret 2023 di Kantor induk, terminal Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar. Manfaat penerapan dan sertifikasi ISO ini antara lain standar ini diakui oleh dunia internasional, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memberi panduan untuk perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil audit eksternal ISO, ditemukan beberapa ketidaksesuaian namun dilakukan upaya perbaikan sehingga permasalahan tersebut dapat dinyatakan close dan KKP Kelas I Makassar Kembali mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015.



Gambar III.1 Sertifikat ISO 9001:2015

2. Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Pelabuhan Parepare

Mobilitas manusia di era milenial bukan hanya berdampak terhadap kecepatan penyampaian informasi ancaman kesehatan global menjadi sisi lain dunia tanpa batas yang mengantarkan penyakit-penyakit yang berisiko menyerang manusia serta ancaman bioterorisme. Secara nasional terdapat 14 designated point of entry yang telah dinilai oleh Joint external evaluation dalam assessment implementasi IHR 2005 dengan nilai 4 yang berarti pintu masuk negara tersebut mempunyai kemampuan dalam menghadapi dan merespon ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kasus PHEIC. 14 designated point of entry termasuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar memiliki wilayah kerja sebanyak 14 lokasi tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar sebagai designated point of entry dalam assessment implementasi IHR 2005, diharapkan semua Wilker KKP Kelas I Makassar mempunyai kemampuan dalam menghadapi dan merespon ancaman kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan PHEIC salah satunya adalah Wilker Pelabuhan Parepare sebagai wujud penerapan International Health Regulation (IHR) 2005 yang mengamanatkan core capacities setiap negara dalam mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan merespon (respond) terhadap seluruh ancaman kedaruratan kesehatan, khususnya dalam kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare mengawasi tiga pangkalan pelabuhan yaitu Pangkalan Nusantara, Pangkalan Cappa Ujung dan Pangkalan Lontangnge ditambah Pelabuhan Khusus Pertamina

Fungsi Pelabuhan Nusantara adalah sebagai pelabuhan penumpang, sedangkan Pelabuhan Cappa Ujung berfungsi sebagai pelabuhan barang/kontainer dan Pelabuhan Lontange sebagai pelabuhan rakyat. Pelabuhan parepare juga menjadi entry point pelabuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tujuan Tawau, Malaysia dan juga sebagai pelabuhan internasional.

Sebagai bentuk uji Rencana Kontinjensi yang telah dipersiapkan dan akan diimplementasikan bersama dengan seluruh LS/LP serta Stakeholder, di Pelabuhan maupun di Wilayah Kota Parepare sebagai kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bahaya yang dapat terjadi, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya khususnya di Kota Parepare Maka di laksanakan "Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Penyakit berpotensi wabah "Influenza (A) HxNy" di Pelabuhan Parepare".

- a. Kegiatan dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 November 2023 di Hotel Bukit Kenari dan Pelabuhan Cappa Ujung
- b. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 55 orang yang berasal dari KSOP Kelas III Parepare, Imigrasi, Pelindo, Agen Kapal, Pos AL, Polsek KPN Parepare, Bea Cukai, Dinas Sosial, Pol PP, Kominfo, RS Andi Makassar, Call Center 112, Stasiun Radio Pantai, Stasiun Karantina Pertanian, Dinas Kesehatan Kota Parepare, Puskesmas Madising NaMario, BPBD Kota Parepare dan TKBM Pelabuhan Parepare.
- c. Simulasi dihadiri oleh Bapak Dirjen P2P Kementerian Kesehatan beserta rombongan dari Tim Kementerian Kesehatan serta dihadiri oleh Bapak Pejabat Walikota Parepare serta pimpinan instansi lintas sektor dan stake holder lingkup kota Parepare serta undangan dari luar wilayah kota Parepare seperti beberapa peserta KKP lain (KKP Tanjung Priuk, KKP Surabaya, KKP Palu, KKP Gorontalo, KKP Banjarmasin, KKP Probolinggo, KKP Palangkaraya, KKP Manokwari di Indonesia. Total undangan sebanyak 150 orang.
- d. Pelaksanaan simulasi disiarkan secara langsung melalui akun youtube KKP Kelas I Makassar melalui link : <https://www.youtube.com/watch?v=T05lajsdkdM>



Gambar III.2 Kegiatan Simulasi Penanggulangan KKM di Pelabuhan Parepare

3. Inovasi Layanan Laik Terbang dan Izin Angkut Orang Sakit Digital (Langsat Digital)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam hal penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang (SKLT) dan Surat Izin Angkut Orang Sakit (SIAOS), Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai UPT dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI memandang perlunya diadakan penguatan dalam hal digitalisasi birokrasi sehingga memudahkan masyarakat mengakses sumber informasi yang dibutuhkan dalam penerbitan dokumen tersebut serta mempercepat proses pemeriksaan kesehatan di bandara udara dan Pelabuhan

Dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien melalui transformasi teknologi kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan.

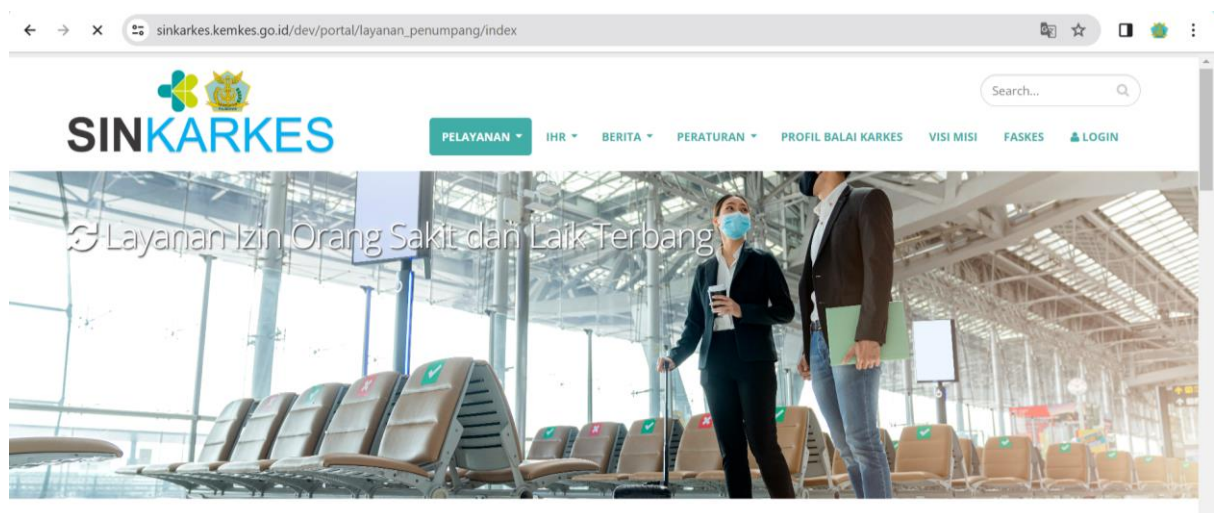
Pelabuhan, bandara dan lintas batas darat yang merupakan tempat kedudukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memiliki karakteristik; sebagai kawasan terbatas dengan batas pemisah berupa ring bewaking (tertutup bagi orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan kegiatan kerja di wilayah tersebut); berperan sebagai "*show window*" serta tempat "*the first contac*" bagi para pengunjung ke wilayah/ negara, yang dapat memberi kesan positif atau negative. Karena itu pemenuhan sarana dan parasarana serta penciptaan iklim yang nyaman, indah dan sehat senantiasa diupayakan dilingkungan bandara untuk memberikan kenyamanan para wisatawan mancanegara maupun pelaku perjalanan lainnya. Demikian halnya dengan prosedur layanan publik dibuat nyaman dan seminimal mungkin mengganggu kenyamanan lalulintas pelaku perjalanan. Namun demikian dalam urusan cegah tangkal penyakit tetap dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi penularan penyakit antar wilayah/negara. Pasca pandemic Covid 19, Kementerian Pariwisata senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendukung kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kelaikan terbang pelaku perjalanan adalah pertimbangan medis yang dilaksanakan untuk menentukan apakah seorang calon pelaku perjalanan, baik itu yang sehat maupun yang sakit, atau harus mendapat perlakuan khusus ,karena calon pelaku perjalanan tersebut mengidap penyakit. Sesuai peraturan penerbangan internasional

(IATA) bahwa calon pelaku perjalanan diharuskan mempunyai keterangan sehat (Fitness for air travel).

Penguatan system informasi digital menjadi sangat penting dalam suatu organisasi sejalan dengan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dari informasi konvensional ke informasi yang serba digital sehingga dengan mudah, akurat, dan cepat informasi apa pun dapat diakses oleh setiap orang di mana saja berada.

Inovasi pelayanan digital yang dilaksanakan oleh KKP Kelas I Makassar adalah Layanan Laik Terbang dan Izin Angkut Orang Sakit Digital yang diberi nama Langsung Digital. Inovasi ini merupakan proyek perubahan dari Kepala KKP Kelas I Makassar dan dalam proses pengembangan lebih lanjut.



Gambar III.3 Tampilan Aplikasi Langsung Digital

4. Pemusnahan Arsip

Makassar, 11 Agustus 2023 merupakan hari bersejarah bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Pemusnahan Arsip untuk pertama kalinya dilakukan setelah mendapat persetujuan pemusnahan sesuai surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor B-KN.00.03/388/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

Pemusnahan Arsip merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah arsip sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang dimusnahkan merupakan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna serta habis masa retensi arsipnya.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Nirwan, SKM., M.Kes selaku Plh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deri Hartanto, S.Ak dan Arida Dwi Oktavianti dari Sesditjen P2P dan Biro Umum Kemenkes RI tentang “Tata Naskah Dinas”.

Selanjutnya kegiatan pemusnahan arsip di KKP Kelas I Makassar dengan disaksikan oleh Kepala Subbagian Administrasi dan Umum, Arsiparis Sesditjen P2P dan Biro Umum Kemenkes RI dan juga Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan KKP Kelas I Makassar dengan menggunakan mesin pencacah kertas sebanyak 1 buah mesin shredder dengan cara di cacah, jumlah arsip yang dimusnahkan sebanyak 1.628 berkas mulai tahun 2003 sampai dengan 2017 secara seremonial yang bertempat di depan lobi KKP Kelas I Makassar.

Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan ditandatangani oleh Plh Kepala, Kasubbag Adum, Koordinator Substansi PKSE, Koordinator Substansi PRL, Koordinator Substansi UKLW dan Arsiparis KKP Kelas I Makassar serta Arsiparis dari Sekretariat Ditjen P2P Kemenkes RI dan Arsiparis dari Biro Umum Kemenkes RI.



Gambar III.4 Pemusnahan Arsip

5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar kembali melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua Institusi Pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Aula Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Lantai 2 pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Universitas Patria Artha (Sulawesi Selatan) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene (Sulawesi Barat) yang dihadiri langsung oleh Kepala

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Agus Jamaludin, SKM.,M.Kes, Wakil Rektor Universitas Patria Artha Bapak Dr. Ilham S.E.,M.M dan Ketua STIKES Bina Bangsa Majene Yulianah Sulaiman, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Agus Jamaludin, dalam sambutan menerangkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar akan berubah nomenklatur mejadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, nomenklatur baru ini pada tahun 2024 sudah resmi berubah, sehingga di tahun ini digiatkan sosialisasi perubahan nomenklatur tersebut, akan tetapi perubahan ini tidak mengubah Tupoksi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yaitu tetap melaksanakan upaya cegah tangkal keluar dan/atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko, kesehatan masyarakat di wilayah kerja Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Negara. KKP Kelas I Makassar termasuk salah satu KKP dengan jumlah wilayah kerja terbanyak yakni sebanyak 9 wilayah kerja yang tersebar pada dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sampai sekarang sudah bekerjasama dengan 16 Perguruan Tinggi di tiga Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah yang terdiri dari 46 Program Studi dari 22 Fakultas.

Mahasiswa magang di KKP Kelas I Makassar diberikan materi tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari KKP Kelas I Makassar dan praktik langsung lapangan tentang tugas pokok dan fungsi KKP Kelas I Makassar yang menjadi bekal ilmu tambahan ketika mahasiswa magang sudah lulus dan terjun di dunia kerja nanti.



Gambar III.5 Penandatanganan MoU dengan Institusi Pendidikan

6. Pelayanan Kesehatan Haji dengan Sistem *One Stop Service* (OSS)

Perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan internasional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai ujung tombak dalam rangka cegah tangkal penyakit melalui pintu masuk negara. KKP memegang peranan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan jamaah haji yang dimulai sejak memasuki asrama haji (masa embarkasi), hingga kembali ke tanah air (masa debarkasi). Sebelum pelaksanaan embarkasi dan debarkasi KKP Kelas I Makassar melakukan koordinasi dengan KKP wilayah timur yang jamaahnya berangkat dari Embarkasi Makassar.

Banyaknya Jamaah haji kelompok lansia tahun 2023 menjadi tantangan yang harus disikapi oleh seluruh elemen pemberi layanan haji. Pelayanan haji tahun 2023 mengambil tagline “Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia”. Tagline tersebut diimplementasikan dengan memberikan layanan prioritas kepada lansia pada seluruh area pelayanan di tanah air maupun di Arab Saudi.

Sejalan dengan kebijakan ramah lansia, pelayanan haji tahun 2023 dilaksanakan dengan menerapkan “*One Stop Services*” (OSS). Layanan dengan metode OSS adalah mengintegrasikan beberapa layanan yang sebelumnya dilakukan pada beberapa lokasi ruangan/bangunan yang berbeda menjadi layanan pada satu lokasi/ruangan. Pemberian layanan seperti pembagian lembar akomodasi, pembagian gelang identitas, pembagian living cost, pemeriksaan kesehatan tahap III dilakukan pada satu lokasi yang sama yaitu di aula penerimaan. Metode ini sangat efisien karena dapat mengurangi waktu layanan dan risiko kelelahan bagi Jamaah, sehingga Jamaah mempunyai waktu istirahat yang cukup selama berada di asrama haji.



Gambar III.6 Calon Jamaah Haji di Aula Penerimaan UPT Asrama Haji

BAB IV HASIL KERJA

A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Tabel IV.1
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1	1	100%
2.	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%
3.	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96	0,98	102,08%
4.	Nilai kinerja anggaran	85	87,89	103,40%
5.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	92,56	99,53%
6.	Kinerja implementasi WBK Satker	81	81,46	100,57%
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	100%	125%
8.	Persentase Realisasi Anggaran	95%	97,80%	102,95%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 ditandatangani oleh KKP Kelas I Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian kinerja tahun 2023 terdapat 8 indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun 8 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN sebesar 1
2. Persentase faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 0,96

4. Nilai kinerja anggaran senilai 85
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran senilai 93
6. Kinerja implementasi WBK Satker senilai 81
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 80%
8. Persentase Realisasi Anggaran sebesar 95%

Terdapat satu indikator kinerja yang belum tercapai yakni Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan target 93 hanya tercapai 92,56.

Adapun nilai IKPA ini terdiri dari beberapa indikator penilaian yakni :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III DIPA
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran
 - b. Belanja Kontraktual
 - c. Penyelesaian Tagihan
 - d. Pengelolaan UP dan TUP
 - e. Dispensasi SPM
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - a. Capaian Output

Nilai yang paling rendah adalah pada deviasi Halaman III DIPA, dari bobot 10 hanya mendapat 5,74. Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan.

B. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja berdasarkan target output kegiatan yang terdapat pada RKAKL 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Tabel Pencapaian Target per RO pada RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

Kode			Kegiatan	Target		Realisasi	
Kegiatan	KRO	RO					
4249	PEA	'001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	6	Kegiatan	7	Kegiatan
4249	QAA	'011	Pelayanan kesehatan haji (HS)	7,224	Orang	15855	Orang
4249	QAA	'012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	5,425	Orang	5425	Orang
4249	QAH	'016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	12	layanan	12	layanan
4249	QAH	'017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	47	layanan	47	layanan
4249	QAH	U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	250	layanan	250	layanan
4249	QAH	U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	240	layanan	240	layanan
4249	QAH	U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	62	layanan	62	layanan
4249	QAH	U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	69	layanan	69	layanan
4249	QAH	U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	28	layanan	28	layanan
4249	QAH	U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	310	layanan	310	layanan
4249	QAH	U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	20	layanan	20	layanan
4249	QAH	U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	114	layanan	115	layanan
4249	QAH	U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	35	layanan	35	layanan
4249	QAH	U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	14	layanan	14	layanan
4249	QAH	U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	60	layanan	60	layanan

Kode			Kegiatan	Target		Realisasi	
Kegiatan	KRO	RO					
4249	RAB	'001	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (HS)	8	Paket	8	Paket
4249	TBC	'001	Pelatihan kesehatan (HS)	73	Orang	73	Orang
4815	AEA	501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1	kegiatan	1	kegiatan
4815	AEA	502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	1	kegiatan	1	kegiatan
4815	AEA	503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	1	kegiatan	1	kegiatan
4815	AEA	504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	1	kegiatan	1	kegiatan
4815	AEA	505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	1	kegiatan	1	kegiatan
4815	CAN	'001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Unit	12	Unit
4815	EBA	956	Layanan BMN	1	Layanan	1	Layanan
4815	EBA	957	Layanan Hukum	1	Layanan	1	Layanan
4815	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	1	Layanan
4815	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1	Layanan
4815	EBA	962	Layanan Umum	1	Layanan	1	Layanan
4815	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	Layanan
4815	EBA	994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	Layanan
4815	EBB	951	Layanan Sarana Internal	14	Unit	14	Unit
4815	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	1	Unit
4815	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	130	Orang	130	Orang
4815	EBC	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	14	Orang	14	Orang
4815	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	1	Dokumen
4815	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen	12	Dokumen
4815	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	12	Dokumen	12	Dokumen
4815	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	12	Dokumen	12	Dokumen

Sumber : MonevPA, 2023

Berdasarkan tabel terlihat keseluruhan target Capaian Output telah tercapai 100%.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2023 sebesar Rp. 33.888.156.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.141.972.269,- atau 97,80% dan bersisa Rp. 746.183.731,-. Anggaran awal KKP Kelas I Makassar sebesar Rp. 36.302.125.000,- pada DIPA awal 30 November 2022. Kemudian pada DIPA 26 Desember 2022 mendapat Blokir Automatic Adjustment (AA) pada belanja pegawai sebesar Rp4.313.797.000,- dan buka blokir dengan mengembalikan anggaran blokir tersebut ke BA BUN pada DIPA Revisi 6 sehingga anggaran menjadi Rp 31.988.328.000. Pemenuhan belanja mengikat dari eselon I sebanyak Rp. 479.728.000 pada revisi DIPA 7 sehingga total anggaran naik menjadi Rp 32.468.056.000 dan penambahan pagu belanja pegawai dari eselon I pada DIPA Revisi 9 sebanyak Rp. 1.420.100.000 sehingga total pagu akhir menjadi Rp.33.888.156.000,-

Tabel IV.3
Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL
Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Tahun 2023

Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
36.302.125.000	33.888.156.000	33.141.972.269	746.183.731	97,80

Sumber : Data Realisasi SAKTI, 2023

Adapun rincian penggunaan atau realisasi anggaran RKAKL KKP Kelas I Makassar tahun 2023 per kegiatan dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikutnya.

Tabel IV.4
Distribusi Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA/RKAKL
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	7,649,859,000	7,138,378,790	93.31 %
PEA	Koordinasi	582,158,000	554,736,092	95.29 %
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	582,158,000	554,736,092	95.29 %
051	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	582,158,000	554,736,092	95.29 %
A	Koordinasi dan Konsultasi Petugas Wilker	102,100,000	90,053,880	88.20 %
B	Pertemuan koordinasi evaluasi pelaksanaan embarkasi/Debarkasi haji	126,052,000	125,581,250	99.63 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
C	Monitoring/ Bimbingan Teknis /Asistensi Ke Wilayah Kerja	81,870,000	79,139,930	96.67 %
D	Konsultasi Pelaksanaan Program P2P	113,835,000	113,611,313	99.80 %
E	Pertemuan/koordinasi LP/LS program karkes dan kespel	154,557,000	142,605,719	92.27 %
F	Rapat Koordinasi bagi klinik dan Rumah Sakit pelaksanan pelayanan Vaksinasi internasional dan penerbitan ICV	3,744,000	3,744,000	100.00 %
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1,827,690,000	1,767,207,225	96.69 %
QAA.011	Pelayanan kesehatan haji (HS)	1,522,320,000	1,481,078,825	97.29 %
053	Pelayanan kesehatan haji di bandara - rp	1,522,320,000	1,481,078,825	97.29 %
A	Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional praembarkasi haji	15,730,000	14,807,000	94.13 %
B	Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji	803,058,000	777,450,775	96.81 %
C	Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji	563,345,000	558,968,850	99.22 %
D	Surveilans Kesehatan Haji Pasca Debarkasi	13,608,000	13,600,000	99.94 %
E	Penyusunan Laporan Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi/Debarkasi Haji	76,689,000	68,749,240	89.65 %
F	Evaluasi dan pembinaan syarat laik terbang bagi jemaah haji	49,890,000	47,502,960	95.22 %
QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	305,370,000	286,128,400	93.70 %
053	Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	305,370,000	286,128,400	93.70 %
A	Verifikasi dan pengawasan terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan	24,024,000	21,644,800	90.10 %
A	penerbitan sertifikat vaksinasi internasional	24,024,000	21,644,800	90.10 %
B	Kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan kesehatan	26,057,000	23,680,000	90.88 %
C	Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja	60,704,000	55,944,000	92.16 %
D	Pelayanan Skrining HIV-AIDS Dalam rangka Hari AIDS Sedunia	3,105,000	2,934,600	94.51 %
E	Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan / Bandara	47,295,000	44,790,000	94.70 %
G	Pelaksanaan Walk Through Survey (WTS) Faktor Risiko Potensi Bahaya Pada Pelayanan Kesehatan	9,540,000	8,910,000	93.40 %
H	Mobile Vaksinasi	9,770,000	9,770,000	100.00 %
I	Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar	108,975,000	104,055,000	95.49 %
J	Skrining kesehatan bagi pekerja dan pengguna jasa bandara/pelabuhan	15,900,000	14,400,000	90.57 %
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3,724,773,000	3,370,577,764	90.49 %
QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	579,240,000	519,392,902	89.67 %
052	pengendalian faktor risiko lingkungan	579,240,000	519,392,902	89.67 %
A	Pelaksanaan Pra Embarkasi	4,950,000	4,350,000	87.88 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
B	Uji Resistensi / Efikasi Insektisida	31,040,000	29,200,000	94.07 %
C	Tindakan penyehatan (desinfeksi TTU, dan lingkungan)	55,612,000	51,651,910	92.88 %
D	Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkantoran/industri/TTU/TPM	11,640,000	11,243,110	96.59 %
E	Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan	194,170,000	179,176,690	92.28 %
F	Diseminasi Informasi Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan	40,170,000	39,270,848	97.76 %
G	Penyuluhan Kemanan Pangan	54,215,000	52,523,050	96.88 %
H	Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan	40,536,000	34,313,415	84.65 %
I	Pengembangan program pelabuhan /bandara sehat	19,722,000	18,663,670	94.63 %
J	Self Assesment Pelabuhan/Bandara Sehat	35,380,000	22,380,000	63.26 %
K	Pemusnahan Limbah Medis	17,975,000	13,896,897	77.31 %
L	Survey dan konfirmasi vektor	30,570,000	28,671,892	93.79 %
M	Pengamatan faktor risiko malaria (survey Anopheles sp)	43,260,000	34,051,420	78.71 %
QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	2,318,745,000	2,136,185,113	92.13 %
053	pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	2,318,745,000	2,136,185,113	92.13 %
A	Layanan Pengendalian Faktor risiko pada alat angkut, orang dan barang	216,000,000	206,700,000	95.69 %
B	Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut	30,000,000	30,000,000	100.00 %
C	Pemeriksaan Kekarantinaan Alat Angkut	18,650,000	18,610,000	99.79 %
D	Table Top Exercise di Pelabuhan Makassar	50,980,000	50,170,000	98.41 %
E	Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB / Penyelidikan Epidemiologi	17,520,000	17,370,000	99.14 %
F	Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis	44,280,000	43,124,216	97.39 %
G	Pengawasan Pelaku Perjalanan (Relawan)	275,100,000	271,800,000	98.80 %
H	Tracing bagi pelaku perjalanan	4,707,000	4,705,200	99.96 %
I	Tindakan penyehatan alat angkut/Lingkungan	57,420,000	51,564,687	89.80 %
J	Dukungan pelaksanaan skrining kesehatan bagi pelaku perjalanan di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Bandara dan pelabuhan	47,292,000	37,983,030	80.32 %
K	Pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional	41,345,000	35,490,000	85.84 %
L	Pendampingan Surveilans Migrasi Malaria	43,680,000	40,979,929	93.82 %
M	Supporting dropping kebutuhan Alkes/Perbekkes/Peralatan/blangko	73,860,000	72,179,630	97.72 %
N	Pertemuan koordinasi Pelayanan Kekarantinaan kesehatan	157,424,000	146,757,364	93.22 %
O	Desiminasi Informasi	58,600,000	55,503,578	94.72 %
P	Simulasi Penanggulangan KKM di Pelabuhan Parepare	371,392,000	346,917,706	93.41 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Q	Peningkatan pelayanan kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara	201,336,000	176,680,996	87.75 %
R	Assesment Core Capacity di Pintu Masuk	127,145,000	111,080,900	87.37 %
S	Pemeriksaan faktor Risiko dan promosi kesehatan pada alat angkut dan awak	57,338,000	50,081,538	87.34 %
T	Evaluasi layanan penerbitan dokumen kesehatan alat angkut	186,148,000	171,459,126	92.11 %
U	Healthy Awarenesss Bagi Pelaku Perjalanan	61,400,000	52,036,650	84.75 %
V	Refreshing TGC KKP Makassar merespon KKM	103,700,000	79,300,000	76.47 %
W	Simulasi/rencana renkon penanggulangan KKM/pengendalian faktor risiko	73,428,000	65,690,563	89.46 %
QAH.U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	112,500,000	80,250,000	71.33 %
053	Pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan penyeberangan - rp	112,500,000	80,250,000	71.33 %
A	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyeberangan	112,500,000	80,250,000	71.33 %
QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	144,000,000	144,000,000	100.00 %
053	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara - rp	144,000,000	144,000,000	100.00 %
A	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara	144,000,000	144,000,000	100.00 %
QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	69,688,000	61,721,400	88.57 %
051	Pengendalian vektor DBD	69,688,000	61,721,400	88.57 %
A	pengendalian vektor DBD	69,688,000	61,721,400	88.57 %
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	153,870,000	138,369,903	89.93 %
053	layanan survei vektor pes - rp	153,870,000	138,369,903	89.93 %
A	Pemetaan	4,071,000	1,321,000	32.45 %
B	Persiapan Bahan dan Alat	24,909,000	23,944,703	96.13 %
C	Pemasangan Perangkat	124,200,000	112,500,000	90.58 %
D	Identifikasi Tikus dan Pinjal	690,000	604,200	87.57 %
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	11,200,000	8,400,000	75.00 %
053	Pengendalian vektor diare - rp	11,200,000	8,400,000	75.00 %
A	pengendalian vektor Diare	11,200,000	8,400,000	75.00 %
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	99,200,000	71,447,000	72.02 %
053	Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	99,200,000	71,447,000	72.02 %
A	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	99,200,000	71,447,000	72.02 %
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	30,400,000	17,943,000	59.02 %
053	Survei vektor malaria - rp	30,400,000	17,943,000	59.02 %
A	Survei Vektor Malaria	30,400,000	17,943,000	59.02 %
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	36,480,000	36,272,500	99.43 %
053	survei vektor diare - rp	36,480,000	36,272,500	99.43 %
A	tanpa sub komponen	36,480,000	36,272,500	99.43 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	44,590,000	39,807,521	89.27 %
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	44,590,000	39,807,521	89.27 %
A	tanpa sub komponen	44,590,000	39,807,521	89.27 %
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	72,660,000	66,838,425	91.99 %
053	deteksi dini terduga TB - rp	72,660,000	66,838,425	91.99 %
A	tanpa sub komponen	72,660,000	66,838,425	91.99 %
QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	52,200,000	49,950,000	95.69 %
053	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria - rp	52,200,000	49,950,000	95.69 %
A	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (SBK)	52,200,000	49,950,000	95.69 %
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	838,412,000	818,205,320	97.59 %
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	838,412,000	818,205,320	97.59 %
053	Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan - rp	838,412,000	818,205,320	97.59 %
A	Perlengkapan Pengendalian Faktor Risiko	174,850,000	173,397,216	99.17 %
B	Bahan dan kelengkapan pengendalian vektor	257,062,000	255,430,404	99.37 %
C	Bahan dan kelengkapan lab sanitasi	43,090,000	39,928,250	92.66 %
D	APD dan Bahan Pelayanan Laboratorium	24,050,000	18,223,850	75.77 %
E	Fasilitas penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan	193,260,000	191,550,000	99.12 %
F	Penyediaan Bahan Kesehatan	99,600,000	98,175,600	98.57 %
G	Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai	1,500,000	0	0.00 %
H	Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan	45,000,000	41,500,000	92.22 %
TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	676,826,000	627,652,389	92.73 %
TBC.001	Pelatihan kesehatan (HS)	676,826,000	627,652,389	92.73 %
053	Pelatihan Bidang Kesehatan - rp	676,826,000	627,652,389	92.73 %
A	Mengikuti Workshop / Simposium Surveilans Epidemiologi dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Petugas	59,441,000	57,545,125	96.81 %
B	Mengikuti Seminar/Kursus/Workshop terkait kekarantinaan kesehatan	38,774,000	35,371,990	91.23 %
C	Peningkatan Kapasitas SDM Entomolog Kesehatan (Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus, on the job training yang berhubungan dengan pengendalian vektor dan BPP)	103,454,000	99,736,960	96.41 %
D	On The Job Training Pengendalian Vektor dan BPP di BTKLPP Surabaya	67,948,000	62,870,040	92.53 %
E	On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan	57,530,000	53,582,280	93.14 %
F	Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan	197,899,000	182,592,560	92.27 %
G	Peningkatan kualitas SDM Laboratorium	1,560,000	0	0.00 %
H	Pelatihan Phlebotomi	10,960,000	10,600,000	96.72 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
K	Pelatihan Kedaruratan Kesehatan	87,192,000	82,567,434	94.70 %
L	On The Job Training ke BTKLPP Makassar dalam rangka kegiatan konfirmasi vektor	8,750,000	8,600,000	98.29 %
M	Peningkatan kapasitas/Seminar/Workshop/Ujian Kompetensi ASN	17,758,000	8,626,000	48.58 %
N	Pelatihan diseminasi informasi melalui pelatihan video editing	25,560,000	25,560,000	100.00 %
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26,238,297,000	26,003,593,479	99.11 %
AEA	Koordinasi	105,892,000	100,434,339	94.85 %
AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	16,500,000	16,152,178	97.89 %
051	pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor	16,500,000	16,152,178	97.89 %
A	Pertemuan/Konsultasi Perencanaan Program	16,500,000	16,152,178	97.89 %
AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	7,820,000	7,807,680	99.84 %
051	pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	7,820,000	7,807,680	99.84 %
A	Pertemuan/Konsultasi Evaluasi Program	7,820,000	7,807,680	99.84 %
AEA.503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	52,010,000	50,837,140	97.74 %
051	Pelaksanaan koordinasi	52,010,000	50,837,140	97.74 %
A	Pertemuan/Konsultasi Keuangan dan Anggaran, SKI/PIPK	52,010,000	50,837,140	97.74 %
AEA.504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	19,952,000	18,540,750	92.93 %
051	pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor	19,952,000	18,540,750	92.93 %
A	Pertemuan/Konsultasi Terkait Hukum dan Organisasi	19,952,000	18,540,750	92.93 %
AEA.505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	9,610,000	7,096,591	73.85 %
051	pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor	9,610,000	7,096,591	73.85 %
A	Pertemuan/Konsultasi Terkait Kepegawaian dan Umum	5,930,000	5,896,591	99.44 %
B	Pertemuan/Rapat/Koordinasi dukungan manajemen	3,680,000	1,200,000	32.61 %
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	124,704,000	122,425,000	98.17 %
CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	124,704,000	122,425,000	98.17 %
057	Pengadaan alat pengolah data dan informasi	124,704,000	122,425,000	98.17 %
A	Pengadaan alat media komunikasi dan informasi	124,704,000	122,425,000	98.17 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23,657,944,000	23,523,337,986	99.43 %
EBA.956	Layanan BMN	71,523,000	67,876,060	94.90 %
051	Pengelolaan BMN	71,523,000	67,876,060	94.90 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	Pengelolaan BMN	59,043,000	58,881,060	99.73 %
B	Penyusunan RKBMN	7,920,000	7,915,000	99.94 %
C	Penghapusan dan Pemusnahan BMN/Arsip	4,560,000	1,080,000	23.68 %
EBA.957	Layanan Hukum	4,470,000	4,470,000	100.00 %
051	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	4,470,000	4,470,000	100.00 %
A	Penguatan Tusi PPNS	4,470,000	4,470,000	100.00 %
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	57,574,000	57,055,178	99.10 %
051	Pelayanan humas dan protokoler	57,574,000	57,055,178	99.10 %
A	Desiminasi Informasi melalui media KIE	49,639,000	49,126,000	98.97 %
B	Koordinasi Penanganan Aduan Masyarakat	7,935,000	7,929,178	99.93 %
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	76,108,000	73,723,920	96.87 %
051	Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	76,108,000	73,723,920	96.87 %
B	Pengembangan WBK	9,935,000	8,083,360	81.36 %
C	Penyusunan/Monev SOP	40,760,000	40,390,000	99.09 %
D	Konsolidasi dan Penguatan SPIPT dan WBK	25,413,000	25,250,560	99.36 %
EBA.962	Layanan Umum	88,932,000	88,854,760	99.91 %
051	Layanan umum dan perlengkapan	88,932,000	88,854,760	99.91 %
A	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	88,932,000	88,854,760	99.91 %
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	19,260,000	19,241,010	99.90 %
053	Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	19,260,000	19,241,010	99.90 %
A	Penyusunan profil	19,260,000	19,241,010	99.90 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	23,340,077,000	23,212,117,058	99.45 %
001	Gaji dan Tunjangan	17,982,685,000	17,928,268,950	99.70 %
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	17,982,685,000	17,928,268,950	99.70 %
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,357,392,000	5,283,848,108	98.63 %
A	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	230,096,000	223,358,966	97.07 %
B	Pengadaan pakaian dinas	148,200,000	148,200,000	100.00 %
C	Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya	19,816,000	19,393,076	97.87 %
D	Pemeliharaan gedung dan bangunan	806,708,000	796,515,654	98.74 %
E	Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor	113,385,000	105,685,885	93.21 %
F	Pemeliharaan dan Operasional kendaraan R4	462,000,000	461,984,428	100.00 %
G	Pemeliharaan dan operasional kendaraan R2	8,000,000	5,835,500	72.94 %
H	Perbaikan peralatan fungsional	6,000,000	5,805,300	96.76 %
I	Langganan daya dan jasa	519,320,000	519,295,660	100.00 %
J	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,000,000	320,000	32.00 %
K	Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja	328,128,000	326,508,000	99.51 %
L	Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan	1,184,278,000	1,174,413,000	99.17 %
L	cleaning service	1,184,278,000	1,174,413,000	99.17 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
M	Sewa gedung/kantor/wilker	140,825,000	139,453,599	99.03 %
N	Sewa rumah jabatan	33,750,000	33,750,000	100.00 %
O	Kalibrasi alat-alat kesehatan	6,000,000	5,946,000	99.10 %
P	Pas pelabuhan/bandara	53,957,000	53,789,891	99.69 %
Q	Kebersihan kantor	564,711,000	559,810,900	99.13 %
R	Sewa Mesin Fotocopy	8,400,000	8,400,000	100.00 %
S	Pemeriksaan Kesehatan ASN	174,135,000	170,660,000	98.00 %
T	Langganan Internet Service Provider	218,460,000	209,193,301	95.76 %
U	Sewa kendaraan Jabatan dan kendaraan operasional	153,440,000	153,436,000	100.00 %
V	Operasional Kendaraan Sewa	22,000,000	18,890,556	85.87 %
X	Langganan Aplikasi Meeting Virtual Berbayar	2,750,000	2,516,657	91.51 %
Y	Penataan Halaman	84,573,000	83,225,735	98.41 %
Z	Pembiayaan tenaga outsourcing	10,000,000	0	0.00 %
AA	Pengurusan sertifikat Tanah	49,500,000	49,500,000	100.00 %
AB	Perpanjangan domain dan maintenance website	7,960,000	7,960,000	100.00 %
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,534,788,000	1,474,976,130	96.10 %
EBB.951	Layanan Sarana Internal	896,482,000	894,429,880	99.77 %
058	Pengadaan fasilitas perkantoran	246,972,000	246,829,880	99.94 %
A	Peralatan dan fasilitas perkantoran	246,972,000	246,829,880	99.94 %
059	Pengadaan kendaraan bermotor	649,510,000	647,600,000	99.71 %
A	Pengadaan Kendaraan Khusus	649,510,000	647,600,000	99.71 %
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	638,306,000	580,546,250	90.95 %
054	Pembangunan fasilitas penunjang	638,306,000	580,546,250	90.95 %
A	Pekerjaan Aspal Keliling Jalan Kompleks Kantor	638,306,000	580,546,250	90.95 %
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	139,906,000	124,979,451	89.33 %
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	40,303,000	40,140,870	99.60 %
055	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	40,303,000	40,140,870	99.60 %
A	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai / Pertemuan Kepegawaian	7,219,000	7,163,000	99.22 %
B	Layanan Mutasi Kepegawaian/Pelatihan Kepemimpinan	23,920,000	23,814,600	99.56 %
D	Pertemuan Kepegawaian	9,164,000	9,163,270	99.99 %
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	99,603,000	84,838,581	85.18 %
051	Layanan Pendidikan dan pelatihan SDM Ditjen P2P	99,603,000	84,838,581	85.18 %
A	Peningkatan Kompetensi	99,603,000	84,838,581	85.18 %
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	675,063,000	657,440,573	97.39 %
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	163,013,000	161,545,976	99.10 %
051	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	163,013,000	161,545,976	99.10 %
A	Penyusunan RKA-K/L	74,011,000	73,147,048	98.83 %
B	Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran	67,090,000	66,911,406	99.73 %

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
C	Penyusunan erenggar	7,250,000	7,122,852	98.25 %
D	Pertemuan/ Konsultasi pengelolaan/Pelaporan PNPB	14,662,000	14,364,670	97.97 %
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	246,394,000	239,028,745	97.01 %
501	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	246,394,000	239,028,745	97.01 %
A	Penyusunan laporan pelaksanaan program	166,676,000	160,166,790	96.09 %
B	Penyusunan Laporan E Monev / pertemuan evaluasi	14,798,000	14,027,720	94.79 %
D	Penyusunan Laporan Tahunan satker	3,150,000	3,146,850	99.90 %
F	Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja	15,360,000	15,354,000	99.96 %
G	Evaluasi SAKIP/Reviu Lakip	46,410,000	46,333,385	99.83 %
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	247,516,000	239,497,847	96.76 %
051	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	192,584,000	186,733,327	96.96 %
A	Penyusunan Laporan Keuangan	43,810,000	40,210,600	91.78 %
C	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2020 dan Semester I TA 2021	44,818,000	44,179,717	98.58 %
D	Rekonsiliasi Pengelolaan PNPB	65,016,000	63,403,010	97.52 %
E	Koordinasi Pengelolaan PNPB	20,640,000	20,640,000	100.00 %
F	Koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan	18,300,000	18,300,000	100.00 %
052	Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P	54,932,000	52,764,520	96.05 %
A	Pencairan Anggaran dan Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U)	38,410,000	37,674,000	98.08 %
B	Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	16,522,000	15,090,520	91.34 %
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	18,140,000	17,368,005	95.74 %
501	Penyelenggaraan Kearsipan	18,140,000	17,368,005	95.74 %
A	Konsultasi Kearsipan	7,350,000	7,137,415	97.11 %
B	Pertemuan Kearsipan	6,350,000	6,049,160	95.26 %
C	Monitoring kearsipan	4,440,000	4,181,430	94.18 %

Sumber : Data Realisasi SAKTI, 2023

D. UPAYA UNTUK MERAIH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI

Upaya yang dilakukan KKP Kelas I Makassar untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah :

1. Melakukan pembenahan SDM Pengelola Keuangan
2. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan
3. Melakukan pembenahan pengelolaan BMN dan pelaporannya
4. Memperbaiki penatausahaan dalam pengelolaan PNBPNBP
5. Melakukan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
6. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi
8. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

BAB V

PENUTUP

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Salah satu laporan berkala yaitu laporan tahunan.

Laporan tahunan merupakan laporan yang bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, “think out of the box”. Laporan tahunan deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun laporan.

Berbagai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa peran dan fungsi KKP sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Tupoksi yang diemban, memberi isyarat bahwa keberadaan KKP dalam sistim pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan garda terdepan dalam upaya menangkal masuknya penyakit ke tanah air. Hasil-hasil kegiatan yang dilakukan perlu dituangkan dalam dokumen sehingga dapat menjadi informasi yang berguna baik kepada pengambil kebijakan, lintas sektor terkait maupun kepada pengguna jasa pelabuhan/bandara.

Data dan informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini sangat berguna bagi pengembangan KKP kedepan, kepentingan riset kesehatan dan bahan evaluasi kegiatan program. Laporan Tahunan KKP Kelas I Makassar tahun 2023 ini juga dapat menjadi salah satu rujukan data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam manajemen kesehatan pelabuhan.

Keberadaan Laporan Tahunan tahun 2023 ini untuk mencapai validasi data dan kontinuitas informasi di tingkat KKP Kelas I Makassar guna menjawab tuntutan perkembangan teknologi informasi. Harapan dalam penyusunan Laporan Tahunan ini akan memberikan deskripsi yang jelas dan sah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna menentukan kebijakan selanjutnya pada setiap unit *decision maker*.

Sangat disadari bahwa Laporan Tahunan ini belum dapat memenuhi harapan dalam penyediaan sistim informasi kesehatan pelabuhan. Namun apa yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa besar upaya cegah tangkal yang telah diperankan oleh KKP Kelas I Makassar.